

MEMBANGUN EKONOMI NAGARI : REALITA DAN HARAPAN

Oleh: Werry Dartu Taifur¹

Abstract

One of the aim of comingback to the local traditional government is, to make the process of developing prosperity Anak Nagari quickly. This aim will be done if the process of developing nagari better than village. It is not easy to reach this aim because in reality, today, there are many differentiation about the assumptions of nagari that we wish. That is why, doing the developing of nagari that is better than village is the heavy challege for the future.

Pendahuluan

Untuk membangun perekonomian nagari paling tidak terdapat empat pertanyaan yang harus dijawab. *Pertama*, bagaimana prinsip membangun nagari. *Kedua*, bagaimana kriteria membangun nagari. *Ketiga*, pendekatan atau strategi apa yang digunakan untuk membangun nagari. *Keempat*, apa tolok ukur keberhasilan pembangunan nagari. Keempat pertanyaan ini perlu dirumuskan dengan baik oleh masing-masing pemerintah kabupaten. Jawaban untuk masing-masing pertanyaan ini

adalah tidak sama untuk setiap kabupaten. Itulah sebabnya peluang dibuka untuk perbedaan struktur pemerintahan nagari.

Tulisan ini mencoba untuk memberi jawaban terhadap empat pertanyaan pokok dalam membangun ekonomi nagari. Pembahasan lebih ditekankan kepada aspek-aspek yang dapat berlaku umum untuk semua nagari dalam membangun ekonominya.

1. Prinsip Membangun Ekonomi Nagari

Membangun ekonomi nagari tidak ada bedanya dengan pembangunan perdesaan

¹ Dosen Fakultas Ekonomi dan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas dan Sekretaris Pusat Studi Kependudukan Univerisitas Andalas, Padang

dalam literatur ekonomi pembangunan. Tujuan pembangunan perdesaan adalah untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa dan memperluas kesempatan kerja dengan produktivitas tinggi. Berdasarkan rujukan ini, maka keberhasilan pembangunan ekonomi nagari terlihat dari peningkatan pendapatan penduduk dan kesempatan kerja.

Berhubung berbagai keterbatasan sumberdaya manusia di perdesaan, maka di daerah perdesaan harus mempunyai kelembagaan yang dapat mempercepat proses pembangunan. Secara garis besar terdapat dua kelompok kelembagaan yang terdapat di desa atau nagari. *Pertama*, kelembagaan yang berkaitan langsung dengan kegiatan produksi. *Kedua*, kelembagaan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi, tetapi mempunyai pengaruh terhadap pembangunan desa (nagari). Dari sejarah kelahirannya, kelembagaan desa/ nagari tersebut ada yang sudah berkembang sendiri atau tumbuh sendiri dan ada kelembagaan yang didorong oleh pemerintah untuk atau sengaja dibuat oleh pemerintah. Kelembagaan di luar kelembagaan pemerintah pada umumnya tumbuh berdasarkan kebutuhan desa atau nagari.

Selanjutnya prinsip dasar yang harus digunakan dalam pembangunan nagari juga tidak banyak berbeda dengan membangun negara. Oleh sebab itu dalam membangun nagari harus memperhatikan pendapat Oslo (1982) dalam bukunya *The Rise and Decline of Nations* yang menyatakan:

"Why a country is relatively prosperous or relatively poor, is the quality of the policies and institution of that country. Luck and natural resources play a role but are secondary. It is institutions and policy that determine nations are rich or poor".

Prinsip ini harus menjadi prinsip baku dalam pembangunan ekonomi nagari di Sumatera Barat. Janganlah mencari prinsip lain, selain dari prinsip yang telah terbukti mensejahterakan rakyat di negara yang relatif miskin sumber daya alam. Membangun nagari masa datang tidak dapat mengandalkan sumberdaya alam yang dimiliki, karena tidak semua nagari mempunyai sumberdaya alam yang memadai. Pepatah yang menyatakan *"ka rimbo babungo kayu, ka lauik babungo karang, ka sungai babungo pasie, ka darek babungo ampiang"* hanya sekedar impian

yang tidak sesuai dengan realita sekarang. Sebagai kasus dapat dikemukakan apa yang dialami oleh Nagari Empat Koto Mudiak, Kabupaten Pesisir Selatan. Hutannya dikuasai oleh penguasa, galian C-nya dikuasai oleh oknum tertentu yang oleh masyarakat setempat disebut dengan "*urang bagak*", retribusi pasar Kuok (Pasar Nagari) sebahagian di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sebahagian dipungut oleh oknum tertentu yang menguasai lahan (Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Pusat Studi Kependudukan Universitas Andalas (1999). Oknum ini juga disebut oleh masyarakat setempat dengan "*urang bagak*" dan membuat institusi lainnya "*indak bagigi*". Ini adalah cerita sedih dari satu nagari. Tentu tidak sedikit nagari yang mengalami nasib seperti yang dialami oleh Nagari Empat Kota Mudiak.

Kekayaan ulayat nagari yang atau ulayat kaum yang selama ini didengung-dengungkan tidak banyak yang dapat diharapkan menjadi sumber kekuatan ekonomi nagari. Banyak nagari yang tidak mempunyai sumber daya alam. Walaupun ada, sumber daya alam tersebut tidak sepenuhnya dapat dikelola untuk menggerakkan potensi ekonomi nagari.

Misalnya, ulayat nagari tersebut ada yang dijadikan kawasan hutan lindung seperti yang terdapat di Nagari Sinurut dan Talu di Kabupaten Pasaman. Seandainya dilakukan pendataan tentang tanah ulayat ini dengan baik, maka jumlah nagari yang memiliki tanah ulayat nagari atau kaum yang berpotensi untuk perkebunan diperkirakan tidak terlalu banyak. Walaupun ada dalam jumlah banyak, lokasinya mungkin terdapat dominan di (Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Pasaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai).

Berdasarkan realita yang ditemui saat ini, maka tidak ada jalan lain untuk memajukan ekonomi nagari dengan memperkuat institusi nagari. Institusi yang diperlukan oleh nagari tidak harus sama, karena kondisi dan persoalan nagari tidak dapat disamakan seperti asumsi yang dipakai dalam membentuk pemerintahan nagari.

Sekarang dana yang akan dialokasikan ke nagari cukup besar oleh masing-masing pemerintah kabupaten. Misalnya, Kabupaten Solok mengalokasikan Rp 250 juta setiap nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan sebesar Rp 100 juta. Kalau institusi nagari tidak dibenahi dengan baik, bukan

tidak mungkin uang Rp 100 juta tersebut *direceh-receh* untuk kegiatan yang tidak produktif, seperti DPRD Propinsi Sumatera Barat *mereceh-receh* uang rakyat sebanyak Rp 11,3 milyar untuk kepentingan yang tidak mempunyai prioritas yang jelas.

Kenapa ekonomi nagari/ desa selama ini banyak yang tidak berkembang? Jawabnya sebahagian besar terletak pada institusi desa/ nagari. Misalnya, kenapa tanah di desa atau nagari banyak tidak dimanfaatkan atau dibiarkan atau kenapa banyak muncul kasus pertanahan di desa/nagari? Jawabnya kembali kepada institusi desa/ nagari yang belum berperan atau mendapat tempat untuk menjalankan misi nagari. Oleh sebab itu pembenahan institusi nagari harus mendapat prioritas oleh pemerintah kabupaten.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelembagaan Nagari

Kelembagaan adalah unsur pembangunan nagari yang sangat penting di luar pembangunan sektor pertanian. Kelembagaan adalah alat mempercepat kegiatan bersama untuk mencapai kemajuan sosial ekonomi dan pembangunan, membentuk pola interaksi diantara manusia dan

hasil-hasil yang bisa dicapai oleh individu dalam proses interaksi, membentuk hubungan sosial yang menyenangkan dan perasaan keikutsertaan dalam kegiatan penting dan berskala besar.

Konsep lembaga atau institusi pada umumnya adalah struktur-struktur organisasi yang menjalankan tugas dan peran yang diakui dan diterima secara formal atau tidak formal (lihat Maznah Muhammad dan Saidin, 1994). Kelompok yang inisiatif berdirinya datang dari masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan kebutuhan sosial, agama dan adat. Kelembagaan ini lebih dikenal dengan organisasi lokal (*local organizations*). Menurut Uphoff (1986), kelembagaan lokal tersebut bertindak atas nama dan bertanggung jawab kepada anggotanya dan terlibat dalam kegiatan pembangunan. Ciri-ciri kelembagaan lokal secara umum adalah (a) lembaga atau organisasi yang melayani kepentingan anggotanya, (b) lebih banyak bertindak secara bersama-sama dibandingkan dengan secara individu, (c) melakukan kegiatan menyerupai institusi pemerintah, (d) lebih berorientasi kepada keuntungan bersama dibandingkan dengan keuntungan secara individu, (e) lebih fleksibel dibandingkan institusi

pemerintah, dan (g) tindakan dan kegiatan kelembagaan berdasarkan konsensus dan kepercayaan.

Kelembagaan lokal tersebut mempunyai tiga fungsi utama (lihat Mazanah Muhammad dan Saidin The, 1994), yaitu: (a) meningkatkan kapasitas sosial (*social capacity*) untuk melakukan tindakan yang terkoordinasi, (b) membolehkan individu berinteraksi secara reguler diantara anggota dan memberdayakan (*empower*) individu sebagai pelaku aktivitas pembangunan, (c) menyediakan struktur yang stabil untuk bertindak dalam mencapai tujuan kelompok.

Kelembagaan lokal berkontribusi terhadap pembangunan desa dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya melalui usaha-usaha (Esman and Uphoff, 1984): (a) menyediakan informasi tentang kebutuhan, prioritas dan kemampuan lokal, (b) memberi umpan balik (*feedback*) atas kegiatan dan pelayanan pemerintah, (c) membagi tanggung jawab dan ongkos dari kegiatan yang diadakan untuk mencapai kebutuhan lokal, (d) memberi kesempatan untuk berkomunikasi secara berkelompok, (e) memobilisasi sumberdaya lokal atas dasar kemampuan sendiri (*a self-*

help basis) dan (f) merekam kepentingan penduduk dan kebutuhan fasilitas.

Selain kelembagaan yang bersifat lokal tersebut diperlukan 7 kelembagaan lagi untuk mempercepat proses pembangunan (lihat Asnawi, 1999). Ketujuh kelembagaan desa tersebut adalah: (a) kelembagaan pemasaran, (b) kelembagaan prasarana dan peralatan, (c) transportasi, (d) kelembagaan pendidikan, (e) kelembagaan kredit, (f) kelompok pembangunan lahan pertanian, (g) kelembagaan untuk perencanaan. Ketujuh lembaga ini mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan produksi di desa.

Pertanyaan berikutnya adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi kelembagaan desa atau nagari. Tingkat perkembangan dan kemajuan suatu kelembagaan secara garis besar ditentukan oleh dua kelompok faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas SDM yang terlibat dalam kelembagaan tersebut dan komitmen terhadap kelembagaan. Kualitas SDM yang baik belum tentu membawa kelembagaan nagari/ desa kepada tingkat keberhasilan yang tinggi, apabila tidak diiringi dengan komunitas yang tinggi dari masing-masing



pihak yang terlibat dalam kelembagaan tersebut. Namun ruang gerak dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh suatu kelembagaan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Secara garis besar, faktor eksternal tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat bidang atau aspek (ekonomi, sosial budaya, politik dan teknologi) seperti yang terlihat pada Gambar 1. Perubahan-perubahan yang terjadi pada faktor-faktor eksternal akan mempengaruhi perkembangan suatu lembaga.

Perubahan pada faktor-faktor eksternal memberi implikasi yang luas kepada kelembagaan desa atau nagari. Implikasi pertama adalah perubahan tersebut mungkin dapat memberi peluang (*opportunity*) kepada suatu organisasi untuk berkembang. Misalnya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberi peluang bagi Nagari untuk berkembang menjadi Badan Perwakilan Desa atau Dewan Perwakilan Rakyat Nagari. Peluang tersebut harus dimanfaatkan oleh masyarakat yang komitmen untuk kembali kepada pemerintahan nagari. Implikasi kedua adalah perubahan-perubahan faktor eksternal juga dapat menjadi ancaman bagi suatu kelembagaan. Misalnya,

terjadi perubahan nilai dan sikap terhadap pimpinan adat akibat semakin berkurangnya peran ninik mamak dalam suatu keluarga dan semakin menonjolnya peran orang tua dalam keluarga.

Tugas masing-masing pemerintah kabupaten adalah bagaimana menjaga kelembagaan nagari dapat memberi kontribusi kepada kepentingan rakyat nagari. Pemerintah harus menghindari untuk menjadikan kelembagaan nagari sebagai kendaraan politik atau kendaraan lainnya yang tidak memberi keuntungan lebih banyak kepada rakyat nagari. Selanjutnya pelaku ekonomi baik pada tingkat kabupaten atau tingkat yang lebih tinggi jangan pula mengunci atau membatasi ruang gerak kelembagaan nagari dan desa yang dapat menimbulkan monopoli di nagari, sehingga dapat mengeksploitasi berbagai kepentingan yang ada di nagari. Harus disadari bahwa eksploitasi di desa atau nagari masih berlanjut sampai sekarang oleh pelaku-pelaku ekonomi. Misalnya, kalau pedagang padi sudah menguasai suatu daerah, pedagang padi lain tidak dapat masuk dengan mulus ke nagari atau desa tersebut (lihat kasus Desa/ Nagari Tanjung Bungkung, Kabupaten Solok). Institusi desa/

nagari yang resmi tidak mempunyai kekuatan untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini. Kalau praktek monopoli kegiatan seperti ini berlanjut di desa atau nagari, usaha mensejahterakan rakyat akan terhambat. Rakyat akan menjadi korban *social exclusion*, dan semakin marjinal dalam proses pembangunan nagari

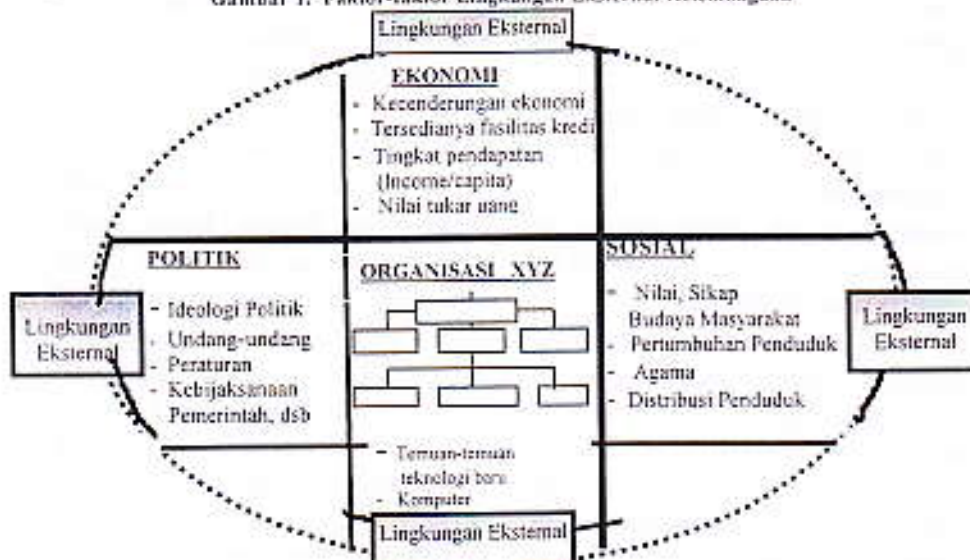
3. Persyaratan Membangun Nagari

Persyaratan membangun nagari telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Namun saat ini yang perlu dibahas lebih lanjut adalah bagaimana cara atau langkah untuk memenuhi persyaratan tersebut. Tekanan

pembahasan tentang cara untuk memenuhi persyaratan tersebut mungkin perlu didiskusikan lebih jauh.

Namun salah satu persyaratan yang terlupakan adalah *data base* nagari. Untuk membangun diperlukan data base. Setelah 13 tahun meninggalkan pemerintahan nagari, profil nagari yang disusun tahun 1975 mungkin tidak memadai lagi, karena sudah banyak yang mengalami perubahan. Suka atau tidak suka, kebutuhan data base nagari harus disiapkan dengan segera untuk membangun nagari. Hal ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama pemerintah kabupaten.

Gambar 1. Faktor-faktor Lingkungan Eksternal Kelembagaan



Sumber: Rencana Pengembangan Kelembagaan Daerah (Modul 6), TOT P3KT

3. Pendekatan Membangun Nagari

Pendekatan untuk membangun nagari cukup banyak yang tersedia dalam literatur literatur ekonomi pembangunan desa. Universitas Andalas juga mempunyai satu jurusan yang berkaitan dengan pembangunan desa pada program pasca sarjana. Kemudian dari segi pemerintah daerah juga telah mengembangkan konsep *one village one product* atau *one nagari one product*. Semua konsep tersebut pasti mempunyai plus dan minus, tetapi yang lebih diperlukan adalah tekad dan komitmen untuk menerapkan konsep tersebut, tidak hanya sekedar retorika atau komoditi politik oleh masing-masing pemerintah daerah. Dari segi konsep pendekatan mungkin tidak ada kurangnya lagi, konsep apa yang tidak jurusan Perencanaan dan Pembangunan, Program Pasca Sarjana Unand. Oleh sebab itu perlu gerakan untuk menerapkan konsep yang telah ada.

Meskipun konsep pembangunan nagari telah tersedia sedemikian rupa, pemerintah atau masyarakat nagari jangan lupa menerapkan kembali nilai-nilai budaya positif yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya,

setiap laki-laki yang ingin menikah, terlebih dulu harus menanam tanaman keras (karet, kopi dan lain-lainnya) berdasarkan keten tuhan adat berlaku di berbagai. Implikasi dari budaya fositif tersebut adalah agar kamu laki-laki mempunyai penghasilan dari tanaman keras tersebut.

5. Ukuran Pembangunan Ekonomi Nagari

Pembangunan nagari, meskipun menghadapi berbagai masalah, harus diukur tingkat keberhasilannya. Ukuran ini diperlukan agar arah yang dituju lebih jelas. Pada tahap awal ukuran ini sangat diperlukan untuk menentukan posisi suatu nagari dimana ia berada (*where are we now*). Kalau suatu nagari tidak tahu dimana ia berada berdasarkan ukuran yang jelas, tentu nagari tersebut tidak akan tahu kemana ia harus melangkah (*where should we be going*). Pemerintah daerah kalau ingin memajukan nagari, maka pada tahap awal harus mengetahui pada tahap apa pembangunan yang telah dicapai sekarang.

Mengingat pentingnya ukuran ini, maka pemerintah daerah perlu mengajak semua komponen untuk mengusulkan dan menetapkan *indeks pembangunan nagari*

yang merangkumi seluruh komponen pembangunan nagari. Di dalamnya termasuk penerapan ABS-SBK, kehidupan sosial dan peranan wanita dalam membangun nagari. Pekerjaan ini memang dirasakan berat dan memerlukan energi, tetapi harus disiapkan dari sekarang kerangkanya. Dengan adanya kerangka tersebut, langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menetapkan indeks pembangunan nagari tersebut akan dapat dilaksanakan secara bertahap. Seandainya tidak disiapkan dengan baik dari sekarang, maka pemerintah dan generasi mendatang akan mendapat kesulitan untuk menentukan tingkat kemajuan nagari yang tepat.

Daftar Bacaan

- A.W. Widjaya (1993), **Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997: Sebuah Tinjauan**, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Pakpahan, (1994), (**Rural Local Organization and Sustainable Development: Aconceptual Analysis**), makalah yang dipresentasikan pada International Seminar On Rural Local Organization and Sustainable Development, Padang 29 Nopember.
- Bappeda dan Pusat Studi Kependudukan Universitas Andalas (1999), **Pemberdayaan Kelembagaan Pedesaan dan Nagari di Sumatera** (Laporan Penelitian)
- Buxton, ND (1998) "In Memoriam: Mancur Olson 19932-1998" *iris update*, 8 (1)

3. Penutup

Untuk membangun perekonomian nagari di Sumatera Barat tidak harus bertumpu kepada ketersediaan sumber daya alam. Prinsip yang harus dipegang adalah memperkuat institusi nagari. Untuk memperkuat institusi nagari, masing masing Pemerintah Kabupaten harus membuat kerangka kerja yang jelas untuk memperkuat institusi nagari.

Keberhasilan pembangunan nagari harus diukur dengan baik. Oleh sebab itu perlu duduk bersama untuk menetapkan indeks pembangunan nagari.

- Deolalikar, Amil B (1995), "Special Employment Programs and Poverty Alleviation". *Asian Development Review*. Vol. 13, No. 2 hal. 50-73.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996), **Peranan Mamak Terhadap Kemanakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini**, Padang: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Barat.
- Direktorat Jenderal PMD Departemen Dalam Negeri (1975), **Peranan Pembangunan Masyarakat Desa Dalam Pelita II**. IIP, Jakarta.
- Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa Depdagri (1995), **Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Tahun Anggaran 1995/1996**, Jakarta.
- Ditjen Pembangunan Desa (1977), **Petunjuk Pelaksanaan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)**. Jakarta.
- Ditjen Pembangunan Desa (1977), **Pokok-pokok Pengetahuan Tentang Lembaga Sosial Desa**. Depdagri, Jakarta.
- Edwar Sutan Pamuncak (1999), "Hai Orang Minangkabau Yang Mengaku Beradat, Marilah Kembali Ke Nagari", *Kumpulan Tiga Karangan*.
- Helmi (1997), "Pengelolaan Irigasi dan Sumberdaya Air yang Berorientasi Efisien dan Pemberdayaan Ekonomi Petani: Beberapa Pemikiran Penyesuaian Kelembagaan Petani", dalam Helmi. et.al (editor), *Penyesuaian Pengelolaan Sumber Daya air dan Pemberdayaan Petani*, Padang PSI-SDALP Unand.
- Kahn, Joel S (1980), *Minangkabau Social Formation: Indonesian Peasants and the World- Economy*, New York Cambridge.
- Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Dati I Sumatera Barat (1998), **Kategori Tingkat Perkembangan LKMD Tahun 1997/1998**.
- Kerapatan Adat Nagari Mungo (1992), **Keputusan Musyawarah Pembangunan Nagari Mungo Kecamatan Luhak**.
- Mazanah Muhammad dan Saidin The (1994), **(Rural Local Organizations and Sustainable Development: The Malaysian**

Experience), makalah yang dipresentasikan pada International Seminar On Rural Local Organization and Sustainable Development, Padang 29 Nopember

Sunarto, N.M (1981), "**Gambaran Umum Tentang Pembangunan Pedesaan di Indonesia**", *Analisis* 10 (3) 205-219.

Syafruddin, Al (1999) "**Sumbar Back to Basic: Merajut Nagari yang Terkoyak-Koyak**", (*Kaba Nagari*) No. 01/1:8-10.

Syofyan Asnawi (1999), **Perkembangan Pemikiran Pembangunan Wilayah Pedesaan**, Padang:PSI-SDLP Univeristas Andalas

Unit Pengembangan Program Latihan – P3KT, Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya (1995), **Analisa Swot Kelembagaan Daerah** (Modul 6).

Werry Darta Taifur (2000), **Menimbang Pemerintahan Nagari**, makalah dipresentasikan pada diskusi bulanan Kelompok Kerja Pengembangan SDM DIPTI Sumatera Barat, 5 Februari 2000